

SELASA WAGE, 24 FEBRUARI 2015
(5 JUMADILAWAL 1948)

DORONG PARPOL SOLID BEKERJA SAMA ✓

Pemilu Serentak, Ideal Diterapkan di Indonesia

BANTUL (KR) - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pemilu Serentak di 2019, dinilai belum memberikan desain yang jelas. Hal ini dikarenakan dalam aturan tersebut belum ada substansi kebutuhan, atas perubahan jenis peraturan perundangan yang segera disiapkan.

Sementara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui *Electoral Research Institute (ERI)* atau Institut Riset Kepemiluan merekomendasikan, agar Pemilu Serentak 2019 didesain dengan model pemilu serentak nasional serta provinsi. Hal ini untuk mendorong parpol solid bekerja sama memenangkan Pemilu.

"Model pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti oleh pemilu lokal serentak pada tingkatan provinsi ini, dinilai dapat menjadi model yang paling ideal dan paling mungkin dilaksanakan di Indonesia untuk waktu ke depan," ujar Guru Besar Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI Prof (Ris) Dr Ikrar Nusa Bhakti saat menjadi narasumber dalam Kuliah Umum Prodi

Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dengan tema "Desain Pemilu Serentak 2019", di Ruang Sidang Fakultas Hukum Kampus Terpadu UMY, Senin (23/2).

Ikrar menuturkan yang dimaksud pemilu serentak nasional dan provinsi itu, pada tingkatan nasional, presiden, DPR, dan DPD dipilih secara serentak. Kemudian dilanjutkan dengan pemilu serentak regional dan lokal pada tingkatan provinsi untuk memilih kepala dan wakil kepada daerah, dan anggota DPRD.

"Dalam arti lain, pemilu nasional serentak terpisah dari pemilu lokal yang juga serentak," jelasnya

Penyatuan pemilu anggota DPRD dengan pemilu kepala

daerah, akan mendorong partai politik untuk bersungguh-sungguh melakukan kerja sama dalam memenangkan pemilu. Hal ini karena kader-kader parpol yang menjadi calon anggota DPRD harus melakukan kampanye secara bersama-sama melalui parpolnya.

"Situasi ini akan memaksa parpol tidak hanya solid bekerja pada saat pemilu, melainkan juga pasca pemilu. Karena jika parpol atau kepala daerah *performance*-nya buruk, akan dihukum pemilih dalam pemilu nasional," lanjutnya.

Selain soal parpol Ikrar menambahkan, jika waktu penyelenggaraan pemilu presiden dibarengkan dengan pemilu DPR RI, maka akan mempengaruhi pilihan anggota legislatif. "Artinya, kemenangan presiden terpilih akan diikuti oleh kemenangan koalisi parpol yang mencalonkannya. Dengan demikian, pemerintahan yang terbentuk akan lebih efektif dalam bekerja. Karena ia mendapat dukungan penuh dari legislatif," tegasnya.

Kondisi harmonis antara presiden dan DPR akan meminimalisir risiko fenomena negara terbelah atau *devided state*. Ikrar juga menambahkan, penyelenggaraan pemilu serentak melalui pemisahan pemilu lokal dan nasional, dapat memberikan jeda waktu bagi penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan tugasnya.

Pemberian jeda waktu dengan sendirinya akan mengurangi beban dan volume pekerjaan penyelenggara pemilu. Sementara di sisi pemilih, pemisahan pemilu lokal dan nasional akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mencari informasi sebanyak mungkin atas kandidat partai yang akan dipilihnya. Dengan begitu pemilih akan lebih bersikap rasional. Diharapkan seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, DPR, DPD dan penyelenggara pemilu untuk memiliki pengertian yang sama mengenai pemilu nasional serentak. (Aje)-m